



Analisis Kebijakan Manajemen Anggaran Pendidikan Islam di Indonesia

Muhammad Shaiful Bahri^{1*}, Baiq Nadia Zulva², Muhammad³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.983>

Received: 11 March 2025

Revised: 15 March 2025

Accepted: 21 March 2025

Correspondence:

Phone:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan manajemen anggaran pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada efektivitas alokasi dana, distribusi anggaran, serta tantangan dan peluang yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap kebijakan anggaran yang berlaku di Kementerian Agama dan instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan anggaran untuk pendidikan Islam dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran antar lembaga pendidikan Islam dan keterbatasan pengelolaan dana. Salah satu tantangan utama adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, yang sering kali berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan dana. Di sisi lain, peluang untuk perbaikan dapat ditemukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan Islam. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan manajemen anggaran, pendidikan Islam, transparansi, akuntabilitas

Citation: Bahri, S.,M., Zulva, N., B., & Muhammad. (2025). Analisis Kebijakan Manajemen Anggaran Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal Pendidikan dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(2), 816-823.
doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.983>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Damopolii, 2015). Pendidikan juga merupakan variable yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu yang baik.

Berbicara tentang mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrument (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (khususnya di sekolah/madrasah) (Maqbulah, 2021; Pampilaya, 2022;

Yusuf, 2023). Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan.

Biaya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan dapat terselenggara secara optimal jika didukung oleh biaya yang memadai (Nursobah, 2022). Tanpa biaya yang memadai, pendidikan akan sulit berkembang. Biaya tersebut diperuntukan pada komponen-komponen pendidikan seperti ruang kelas, ruang kantor, ruang perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium, perangkat komputer, honorarium guru pegawai dan lain-lain.

Biaya pendidikan sangatlah penting. Untuk itu, biaya atau dana harus diusahakan oleh para pelaku pendidikan secara kreatif, bukan hanya mengandalkan pemerintah dan orang tua wali murid, tetapi juga harus

Email: muhammadshaifulbahri514@gmail.com

mampu menggali dari sumber lain yaitu masyarakat (Sulistiyarini et al., 2024), baik secara individu atau kelompok, atau atas nama perusahaan dan sejenisnya dalam bentuk bantuan sukarela/hibah melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf dan lain-lain. Pelaksanaan pembiayaan untuk pendidikan harus dapat dikelola secara baik dan benar, profesional dan proporsional (Darim, 2020). Artinya biaya yang memadai bahkan lebih, tidaklah cukup bagi terselenggaranya pendidikan yang baik dan bermutu, jika tidak ditunjang dengan pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen (Rivai, 2016).

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola keuangan secara profesional dan proporsional untuk dialokasikan terhadap program-program pelaksanaan operasional pendidikan. Karena tujuan manajemen pendidikan itu sendiri adalah penggunaan dana atau anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif, guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Thoha, 2016). Sedangkan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara umum adalah penganggaran, pembukuan dan pengawasan.

Organisasi pendidikan dan keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Permasalahan keuangan adalah bagian dari organisasi yang harus dikelola secara teratur dan rinci dalam organisasi pendidikan (Syaiyullah, 2021). Sekolah atau pesantren yang berada di bawah lembaga pendidikan Islam selalu berkaitan dengan adanya dana yang berasal dari sumbernya. Adapun dalam mencapai tujuan, pengelolaan harus dilakukan secara benar, rapi, teratur, dan tertib. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen dalam mengelola dana tersebut agar sejalan dengan ajaran Islam.

Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dilakukan di sekolah sehingga kegiatan pendidikan di sekolah menjadi teratur. Manajemen keuangan diterapkan melalui beberapa tahap antara lain: merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), mengawasi dan mengendalikan (*controlling*) (Sukma & Nasution, 2022).

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap administrasi Pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan diatur oleh seorang bendaharawan dengan cara membuat pembukuan berdasarkan aturan yang berlaku (Yulia, 2019).

Al-Qur'an dengan fungsinya sebagai petunjuk, diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw agar menuntun manusia untuk menjadi umat yang terbaik sepanjang zaman. Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam juga dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan segala persoalan. Hal tersebut karena Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang muamalat, ibadah, jinayat, melainkan juga berbicara persoalan

sosial kemasyarakatan, politik dan ekonomi (pengelolaan uang) (Najihah & Muhammad, 2021).

Dalam pandangan Islam, segala perbuatan harus dilakukan dengan baik, tepat, dan teratur serta memperhatikan kedisiplinan. Hal-hal tersebut lebih dikenal dalam ilmu masa kini dengan manajemen. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, tujuan yang dijabarkan dalam penulisan makalah ini adalah untuk Menganalisis Kebijakan Manajemen Anggaran Pendidikan Islam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kebijakan manajemen anggaran pendidikan Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan kebijakan anggaran pendidikan Islam secara mendalam dan holistik.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini meliputi:

Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber terkait kebijakan anggaran pendidikan Islam, seperti dokumen anggaran pemerintah, laporan tahunan Kementerian Agama, serta regulasi dan kebijakan yang mengatur alokasi anggaran pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, wawancara dengan para pemangku kebijakan di Kementerian Agama, serta beberapa pihak terkait di lembaga pendidikan Islam juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai pelaksanaan dan tantangan kebijakan.

Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang berfokus pada penggambaran dan pemahaman kebijakan anggaran pendidikan Islam yang ada. Peneliti menganalisis pola-pola distribusi anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta tantangan dalam pengelolaan anggaran yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Analisis ini juga melibatkan pemetaan isu-isu strategis yang muncul dalam kebijakan anggaran pendidikan Islam di Indonesia.

Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menginterpretasikan temuan-temuan yang ada dan menarik kesimpulan mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan manajemen anggaran pendidikan Islam di Indonesia. Peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan anggaran serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Verifikasi Data

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas data yang diperoleh, baik melalui triangulasi sumber data maupun teknik lain seperti diskusi kelompok atau konsultasi dengan ahli di bidang kebijakan pendidikan.

Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika kebijakan anggaran pendidikan Islam di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Manajemen

Hakekat manajemen adalah *at-tadbir* (pengaturan) yang berasal dari kata *dabbar* yang bermakna mengatur. Adapun manajemen menurut Arikunto (2008) adalah serangkaian kegiatan yang berbentuk kerjasama yang dilakukan sekelompok manusia dalam mengelola segala sesuatu yang ada di tubuh organisasi pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Pengertian lain dari manajemen adalah keterampilan atau kemampuan dalam mendapatkan suatu hasil sebagai bentuk pencapaian tujuan melalui beragam kegiatan bersama orang lain. Dari definisi yang telah dijelaskan, manajemen bisa dimaknai sebagai alat utama administrasi (Hadijaya, 2012). Prinsip manajemen dibagi menjadi empat fungsi manajemen George R. Terry yang diberi singkatan P-O-A-C, yakni *planning, organizing, actuating dan controlling* (Syam, 2018).

Manajemen juga bisa diartikan sebagai sebuah seni. Seni yang dimaksud yakni seni pengorganisasian sesuatu sebagai usaha dalam mewujudkan tujuan tertentu. Untuk mencapai kemajuan dalam berorganisasi, manajemen memberikan peran yang sangat penting dalam segi penataan berbagai bidang yang tercantum dalam organisasi. Pembinaan tersebut ditujukan kepada sumber daya manusia (anggota organisasi), bidang administrasi bidang sarana dan prasarana, dan yang paling penting juga bidang keuangan.

Manajemen keuangan dianggap sebagai hal yang sangat penting di lembaga sekolah. Dengan kata lain, manajemen keuangan bisa disebut penentu jalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Tidak hanya di sekolah, pada manajemen pendidikan yang lainnya juga menjadi sangat penting. Manajemen keuangan seringkali disebut dengan tata pembukuan. Definisi manajemen keuangan secara luas bias diartikan dengan sebuah kegiatan mengurus dan mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan dalam memanfaatkan uang. Dari pendapat-pendapat tentang manajemen yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen ialah usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan dan

mengembangkan sumber daya (manusia atau yang lainnya) dengan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan tertentu. Terdapat beberapa hal yang perlu diterapkan dalam mengatur manajemen keuangan antara lain: merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*Actuating*), hingga mengawasi (*controlling*) (Sukma & Nasution, 2022).

Lembaga pendidikan formal dituntut untuk mengatur keuangan dalam pendidikan dengan berusaha mengelola sumber keuangan dengan mengatur pemanfaatan keuangan, mengevaluasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pendidikan, pembiayaan merupakan suatu yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan manajemen pendidikan yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan setiap aktifitas di sekolah secara sadar atau tidak sudah pasti memerlukan adanya dana. Oleh karena itu, untuk mengatur keuangan dibutuhkan manajemen keuangan yang benar. Manajemen keuangan mempunyai komponen utama yang perlu dikelola dengan sangat baik. Komponen-komponen tersebut meliputi: (1) tata cara mengatur anggaran; (2) cara mengelola keuangan; (3) prosedur investasi; (4) pembelajaran, cara mendistribusikan dan pergudangan; serta (5) tata cara memeriksa dan mengawasi (Mulyasa, 2011).

Sebagaimana manajemen yang lainnya, manajemen keuangan juga mempunyai tujuan yang harus dicapai, yaitu untuk sebuah keefektifan dalam hal penggunaan uang serta menghindari pelanggaran aturan. Selain itu agar dapat melaporkan keuangan secara akuntabel dan transparan. Peran seorang kepala sekolah dalam mengatur keuangan semestinya dilakukan secara menyeluruh agar kebutuhan pembiayaan aktivitas sekolah dapat dilakukan secara efektif, diupayakan adanya pembukuan yang transparan serta dapat dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas sekolah. Dengan demikian, tujuan manajemen pembiayaan sebagaimana dikemukakan oleh Jusuf (1992) adalah: (1) memajukan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan keuangan sekolah; (2) mengembangkan akuntabilitas serta transparansi keuangan di sekolah; dan (3) mengurangi penyelewengan anggaran sekolah.

Manajemen keuangan Islam dalam hal penulis menyimpulkan bahwa dalam khazanah keislaman, al-Qur'an dan hadis sudah semestinya dijadikan sebagai sumber utama dalam segala aktivitas kehidupan. Begitu pula dalam manajemen keuangan yang merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan harus diatur semaksimal mungkin. Pengelolaan keuangan yang maksimal bukan hanya bergantung pada bagaimana mengelola yang baik, akan tetapi bergantung karakter seorang manajer

keuangan pula. Oleh karena itu, pemilihan manajer keuangan harus sangat hati-hati. Karakter yang berpedoman teguh pada asas keislaman menjadi prioritas utama dalam memilih manajer keuangan di lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 5.

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Sumber Keuangan Pendidikan Islam

Hal yang perlu diketahui oleh seorang manajer dalam mengelola keuangan suatu lembaga pendidikan ialah sumber keuangan atau pembiayaan. Secara umum, sumber keuangan di sekolah dapat dibagi menjadi 3 sumber yaitu:

Pemerintah

Dana yang bersumber dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat atau daerah. Dana tersebut bisa bersifat khusus atau umum yang dimanfaatkan kepentingan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 menjelaskan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah. Selain itu, Pasal 49 Ayat 3 juga menjelaskan bahwa dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah untuk satuan pendidikan. Berdasarkan Undang-undang yang dikemukakan, sudah jelas bahwa sumber utama pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat. Masyarakat harus pro aktif dalam menyukseskan proses pendidikan yakni dengan membantu secara finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dalil atau dasar dari hal ini adalah hadis berikut:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Dan ingat setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya (HR. Bukhari).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen keuangan, dalam hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan dengan maksimal dan benar.

Tanggung jawab tidak hanya tugas yang telah tertulis, melainkan juga kemauan untuk terus belajar dalam mengelola suatu lembaga pendidikan.

Wakaf

Wakaf adalah dana yang sering disebut dengan sumbangan. Secara umum diartikan sebagai hadiah yang diperuntukkan mencukupi keperluan spiritual kaum muslimin, dan sarana umum. Misalnya, dari dana sumbangan tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan rumah sakit dan sekolah, membangun dan merawat tempat ibadah, sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam ke 5 ini dapat dijadikan sebagai sumber biaya pendidikan. Zakat yang sudah dikumpulkan harus dikelola secara transparan dan profesional, sebagaimana dalam QS al-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”..

Dana sumbangan selain zakat adalah sedekah dan infak. Asal kata infak diambil adalah *anfaqa* yang mempunyai makna mengalokasikan dana untuk suatu kepentingan. Adapun asal kata sedekah adalah benar. Sedangkan definisi secara istilah, sedekah artinya sama dengan pengertian infak secara hukum dan segala ketentuannya. Sedikit yang membedakan antara infak dan sedekah adalah jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah bisa diartikan materi atau non materil (Najihah & Muhammad, 2021). Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang potensial (Hidayat & Wijaya, 2017).

Orang Tua atau Peserta Didik

Dana pendidikan yang berasal dari orang tua siswa merupakan pembiayaan wajib yang dilakukan oleh masyarakat. Pembiayaan ini diistilahkan dengan kata dana komite. Secara umum, uang komite dibagi menjadi 3 macam, yaitu: (a) Dana syahriah merupakan pembiayaan wajib yang harus dilengkapi oleh orang tua siswa di setiap bulan selama masih terdaftar menjadi peserta didik; (b) Dana *incidental* yaitu pembiayaan

wajib yang dibebankan pada siswa satu sekali selama menjadi peserta didik; dan (c) Dana sumbangan sukarela ialah biaya yang diberikan secara sukarela oleh orang tua peserta didik.

Masyarakat

Pendanaan yang berasal dari masyarakat yang bersifat sukarela baik yang dikeluarkan secara pribadi maupun kelompok. Menurut Najihah & Muhammad (2021), sumber keuangan lain yang tidak wajib bisa berasal dari sumber intern ataupun ekstern. Sumber dana yang berasal dari usaha membentuk badan usaha atau wirausaha, dikategorikan sebagai sumber dana intern.

Usaha tersebut bisa dibangun bisa dilakukan secara mandiri atau secara kerja sama dengan pengusaha. Jika dana telah masuk pada lembaga pendidikan, maka manajer lembaga tersebut harus berusaha mengembangkan dengan cara mendirikan beberapa usaha yang produktif. Dengan seni manajerial, kepala sekolah yang kreatif dalam menggali dana, ketika telah membuahkan suatu hasil harus digunakan secara jujur dan terbuka, kemudian mengembangkan dengan cara yang produktif serta Hasil dari usaha mandiri tersebut, harus digunakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Pengelolaan usaha mandiri yang benar akan membantu kemajuan lembaga pendidikan tersebut.

Pengelolaan biaya pendidikan di lembaga pendidikan harus berpedoman pada PP No 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 62 Ayat 4. Pasal 62 Ayat 1 tersebut mengemukakan bahwa biaya operasional pendidikan, antara lain: (a) Honorarium tenaga kependidikan dan pendidik dan segala tunjangannya menjadi satu; (b) Peralatan pendidikan atau bahan yang sudah tidak bisa dipakai; (c) Biaya operasional pendidikan berupa sarana dan prasarana air, konsumsi daya, pemeliharaan, jasa telekomunikasi, transportasi, uang lembur, asuransi, pajak, dan yang lainnya.

Sumber keuangan dalam lembaga pendidikan menurut penulis bisa diadakan sesuai kebijakan yang ditetapkan setiap lembaga pendidikan Islam. Tidak kalah penting dari sebuah pelaksanaan kebijakan adalah niat dalam penentuan segala keputusan. Jika niat yang tertanam bertujuan untuk kemaslahatan bersama, maka tujuan dari lembaga pendidikan Islam akan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Tahapan-Tahapan Manajemen Keuangan

Pelaksanaan manajemen keuangan yang sesuai dengan undang-undang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: kegiatan menganggarkan (*budgeting*), kegiatan menyelenggarakan pembukuan (*accounting*), dan menilai dan mengevaluasi (*auditing*).

Budgeting

Budgeting adalah proses menyusun dana operasional yang ditulis secara kuantitatif yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan pada batas waktu yang ditentukan (Fatah, 2000). Penyusunan rencana anggaran di suatu lembaga bisa dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu mikro dan makro. Pendekatan mikro adalah penghitungan biaya berdasarkan dana yang keluar dari setiap komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan makro adalah jumlah keseluruhan pengeluaran pendidikan yang dibagi dengan jumlah peserta didik.

Perencanaan anggaran pendidikan tingkat sekolah yang benar hendaknya dilakukan sesuai prosedur yakni dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam RAPBS tercantum di dalamnya jenis sekaligus besarnya pemasukan dan pengeluaran. Dalam penyusunan RAPBS yang sesuai prosedur, dilakukan dengan tahapan: (a) Mencatat acara yang akan dilaksanakan selama 1 tahun; (b) Mencatat sumber pemasukan yang dinyatakan dalam bentuk uang; (c) Menyusun anggaran berupa format yang telah disetujui dan digunakan; (d) Mencatat secara rinci ide tentang anggaran agar disetujui oleh pihak yang bertugas; (e) Merevisi ide tentang anggaran; (f) Menyetujui rencana anggaran; dan (g) Mengesahkan anggaran (Sukma & Nasution, 2022).

Accounting

Pengeluaran dan pemasukan dalam manajemen keuangan harus tertulis dalam pembukuan anggaran secara tertib dan teratur agar bisa membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. kepala sekolah harus memperhatikan beberapa hal untuk mendukung manajemen yang baik antara lain:

Perlengkapan administrasi keuangan, yakni terdapat tempat khusus di sekolah untuk menyimpan semua perlengkapan administrasi keuangan, buku-buku yang menunjang kebutuhan manajemen keuangan, serta alat hitung; Sekolah hendaknya mempunyai RAPBS lengkap dengan penjabaran program yang telah disahkan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan Pengadministrasian keuangan, yakni sekolah harus mempunyai barang dan uang yang telah disesuaikan dengan sumber dananya dan anggarannya, memiliki catatan yang berisi tentang penerimaan gaji guru dan tenaga pendidik yang lain, buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan, Selain itu sekolah harus mempunyai laporan keuangan triwulan dan tahunan.

Auditing

Proses *auditing* ialah suatu tahapan dalam manajemen keuangan dimana kepala sekolah bertugas mengawasi arus pembiayaan, sehingga dapat dikendalikan serta dapat seimbang dengan anggaran

belanja yang sudah dibuat. Tumanggor et al. (2021) mengemukakan bahwa tahapan pengawasan ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni memantau (*monitoring*), memberi penilaian, dan melaporkan.

Etika dalam Manajemen Keuangan Pendidikan Islam

Etika dalam suatu organisasi pendidikan sudah semestinya tidak ditinggalkan, terutama dalam manajemen keuangan. Dalam penerapan manajemen keuangan, terdapat etika yang harus dipatuhi oleh pelaksananya. Seorang auditor (orang yang memberi penilaian keuangan sekolah/madrasah) harus memiliki etika, sebagaimana dikemukakan oleh (Hidayat & Wijaya, 2017) sebagai berikut:

Integritas, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan pada seseorang, integritas, kompetensi, kemampuan dan kualifikasi ditempatkan pada posisi dengan nilai tertinggi dalam mengarahkan perilaku seorang muslim.

Keikhlasan, dalam melaksanakan tugas sebagian pengelola keuangan, seseorang tidak boleh tunduk pada pengaruh dan tekanan dari luar. Selain itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka diperlukan adanya komitmen dalam beragama, ibadah dalam menjalankan tugasnya.

Ketakwaan, takwa adalah sikap meyakini bahwa setiap gerakannya selalu diawasi oleh Allah dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Seorang yang bertakwa selalu mempertimbangkan perilakunya apakah disukai Allah atau tidak. Hal itu menjadi cara untuk melindunginya dari resiko dari perilaku yang tidak dibenarkan oleh syariah. Ketakwaan sangat perlu ditanamkan pada seorang yang tugasnya berkaitan dengan penggunaan kekayaan atau transaksi. Oleh karena hal itu, sesuatu yang sangat memungkinkan berbuat dzalim dan tidak sesuai dengan syariah. Ketakwaan merupakan pengawas diri agar kuat dalam menghadapi godaan yang berasal dari profesinya. Untuk menanamkan sikap takwa ini, selain diusahakan dengan menerapkan kode etik profesi rasional, tetapi juga harus didasari oleh motivasi diri sendiri dengan memupuk kepercayaan dan keyakinan akan adanya Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita.

Keberanian, seorang akuntan hendaknya berjuang dalam menegakkan kebenaran dengan melaksanakan kewajibannya dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Seorang akuntan harus menyadari bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan harus meyakini Allah selalu hadir dan mengawasi perbuatan kita.

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi (keterbukaan) merupakan sifat terbuka dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan lembaga. Transparansi keuangan sangat penting adanya bagi semua pihak yang dianggap perlu untuk mengetahui kondisi keuangan dalam suatu lembaga. Dengan adanya transparansi juga akan memberikan dan menguatkan kepercayaan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dengan cara yang mudah saat mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan.

Akuntabilitas

Kemampuan dalam menggunakan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 syarat adanya akuntabilitas yakni: adanya keterbukaan pengelola pendidikan dalam memberikan masukan dan partisipasinya di setiap kegiatan sekolah, terdapat standar dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai fungsi, wewenang, dan tugasnya, keikutsertaan dalam menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dengan menyediakan layanan pendidikan yang murah dan proseder yang tidak berbelit-belit.

Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga (Kompri, 2017). Manajemen pembiayaan/keuangan dapat dinilai keefektifannya ketika berhasil membiayai dan mengatur keuangan dengan tepat saat menyelenggarakan kegiatan yang berkualitas.

Efisiensi

Efisiensi adalah adanya pengeluaran dan pemasukan seimbang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien ketika dapat menggunakan tenaga, waktu, dan biaya dengan tepat guna akan tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan (Riski, 2019).

Menurut hemat penulis, pelaksanaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam, dibutuhkan kesesuaian antara teknis pelaksanaan, prinsip, etika, dan tujuan. Agar pengelolaan keuangan bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi dengan selalu berpedoman teguh pada al-Qur'an dan hadis.

Urgensi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam

Keuangan lembaga pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menunjang sumber daya penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Hal tersebut dapat mengarahkan pada efektivitas pengelolaan pendidikan agar terlaksana sesuai harapan. Terlaksananya pendidikan yang sesuai dengan tujuan, harus didukung dengan kemaksimalan manajemen pendidikan pada umumnya dan khususnya dalam manajemen

keuangannya. Manajemen keuangan yang maksimal akan tercapai ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kemudian dilaporkan dengan jujur dalam bentuk pembukuan maupun pertanggungjawaban.

Seorang manajer hendaknya memahami tujuan, fungsi, dan manfaat pembukuan anggaran ini. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai manajer diharuskan mampu menjelaskan kepada para staf keuangan yang ditugaskan. Hal yang memiliki kaitan dengan pembukuan tersebut antara lain:

Buku pos. Dalam buku pos, aktivitas pembelanjaan dicatat dengan rinci sehingga dapat diketahui dengan mudah informasi tentang sisa atau kurangnya dana dalam setiap pos anggaran.

Faktur adalah arsip dari lembaran-lembaran bukti pembelian. Beberapa lembar kertas yang diarsipkan. Faktur berisi rincian tentang: rincian barang yang dibeli, tanggal pembelian, maksud pembelian, jenis pembelian, jumlah pembayaran, tanda tangan kepala sekolah. Poin penting yang perlu diperhatikan yaitu: (a) Sebelum uang dibayarkan faktur sudah ditulis dan diberi tanda tangan; (b) Terdapat nomor yang tertulis; (c) Lampiran bukti pembelian; dan (d) Pemanfaatan uang umum dipertanggungjawabkan dengan faktur.

Buku kas. Buku kas adalah buku berisi catatan aktifitas keluar masuk anggaran secara rinci beserta saldo harian yang tersisa.

Lembar cek. Lembar cek adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa pembayaran yang dikeluarkan itu sah. Lembar cek dikeluarkan jika terjadi transaksi pemesanan dan pengiriman barang. Orang yang mempunyai wewenang untuk memberikan tanda tangan di lembar cek ialah kepala sekolah dan pengelola keuangan.

Jurnal. Buku jurnal adalah buku pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan setiap harinya.

Buku besar/Buku induk. Buku besar yaitu buku yang berisi catatan informasi data keuangan yang berasal dari jurnal pada setiap akhir bulan.

Buku kas pembayaran uang sekolah. Buku ini berisi catatan siswa yang membayar, jumlah, tanggal pembayaran, dan kekurangan yang harus dibayar atau kelebihan dari pembayaran.

Buku kas piutang. Buku yang berisi data mengenai hutang piutang di suatu sekolah.

Neraca percobaan. Neraca percobaan digunakan untuk mengetahui kondisi anggaran setiap 2 minggu sekali agar seorang manajer atau kepala sekolah dapat mempertimbangkan keputusannya tentang segala kebutuhan yang harus ditunda atau didahulukan. Karena kepala sekolah adalah pengawas yang sangat ditunggu kebijakannya.

Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan teliti.

Penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan bisa dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam mengatur keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada pemerintahan dan masyarakat. Tepatnya kerjasama yang tulus seorang kepala sekolah dan manajer keuangan dalam manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting untuk memanfaatkan dan mencari segala macam sumber dana agar terhindar dari kekurangan dana. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawabannya tidak hanya dihadapkan pada hubungan dengan manusia saja, akan tetapi juga dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. Oleh karena itu, sebelum dan selama mengelola lembaga pendidikan sebaiknya manajemen qalbu para *stakeholder* lembaga pendidikan Islam harus senantiasa dikondisikan terlebih dahulu.

Kesimpulan

Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan yang berupa kerja sama yang dilakukan sekelompok manusia dalam mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Adapun sumber keuangan dalam sekolah antara lain: pemerintah dan masyarakat, wakaf, zakat, orang tua dan peserta didik, masyarakat, kewirausahaan. Dalam proses manajemen keuangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan sekolah antara lain: penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), evaluasi (*auditing*). Selama pelaksanaan manajemen keuangan, terdapat etika yang harus dianjurkan oleh pendidikan Islam diantaranya adalah: integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, manusia bertanggung jawab dihadapan Allah. Selain etika, terdapat prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus dipegang yakni: transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Refrensi

- Damopolii, M. (2015). Problematika Pendidikan Islam dan Upaya-Upaya Pemecahannya. *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 68–81.
- Darim, A. (2020). Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22–40.
- Hadijaya, Y. (2012). *Administrasi pendidikan*. Perdana Publishing.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2017). *Ayat-ayat alquran tentang manajemen pendidikan islam*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Jusuf, K. (1992). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

- Kompri. (2017). *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional Edisi Pertama*. Kencana.
- Maqbulah, A. (2021). Kajian Referensi tentang: Biaya Pendidikan Mandiri yang Berorientasi pada Mutu. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(5), 354–359.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najihah, I., & Muhammad, S. H. (2021). Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 223–239.
- Nursobah, A. (2022). Manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Riski, A. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*. OSF.
- Rivai, V. (2016). *Islamic Quality Education Management*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–57.
- Sulistiyarini, E., Hartinah, S., & Purwanto, B. E. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 5(3), 3888–3901.
- Syaifulloh, M. S. (2021). Manajemen keuangan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 4(1).
- Syam, Z. (2018). Hubungan Penerapan Fungsi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai di Puskesmas Antang Kota Makassar Tahun 2018. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Thoha, M. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam Konsep dan Operasional*. Pustaka Radja.
- Tumanggor, A., Tambunan, J. R., & Simatupang, P. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Penerbit K-Media.
- Yulia, R. (2019). *Administrasi keuangan sekolah*. OSF.
- Yusuf, M. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(1), 16–23.